



MANAJEMEN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK PENCAPAIAN MUTU PEMBELAJARAN

Siti Badriah, K.A Rahman, Muazza*

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, Indonesia

Correspondence: *E-mail: sitibadriah1605@gmail.com

ABSTRACTS

This research aims to show how the management of School Operational Assistance (BOS) funds is implemented to achieve learning quality. This research uses descriptive method with qualitative approaches in Junior high school in Muaro Jambi. The results showed: (1) The implementation of the management of BOS funds at junior high schools in Muaro Jambi has been based on applicable laws and technical guidelines. But the result is not optimal because of the limited funds received by the school; 2) In reality the principal difficult to use the funds exactly in accordance with RKAS. The school principal also difficult to innovate because the use of the funds should not be used instead of the 13 components that have been specified in the Technical Handbook (Technical Guidance) use of the funds. 3) Delays in the distribution of BOS funds be an obstacle big enough and the lack of awareness and understanding of the principals in managing the BOS funds are transparent and accountable. This makes is difficult to increase the quality of education; and 4) The biggest allocation is to meet the standards development costs educators as well as the process of teaching and learning activities.

Keyword: Fund Management, Learning Quality, School Operational Assistance (BOS).

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 19 Oct 2021

First Revised 03 Nov 2021

Accepted 20 Jun 2022

First Available online 24 Jun 2022

Publication Date 01 Oct 2022

1. PENDAHULUAN

Di negara maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia (*human capital investment*) dan menjadi “*leading sector*”. Oleh karena perhatian pemerintahnya terhadap pembangunan pada sektor pendidikan ini sungguh-sungguh, sehingga terwujud dengan adanya komitmen politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya (Saisarani et al., 2021; Sari et al., 2021).

Pemerintah Indonesia telah menyusun skala prioritas untuk mencerdaskan bangsa, dan bisa jadi hal tersebut berawal dari bertambahnya anggaran pendidikan atau terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Selama lebih enam dekade pembangunan pendidikan dilaksanakan, sudah banyak terobosan-terobosan berarti yang dilakukan pemerintah, baik dalam konteks perluasan akses, peningkatan mutu maupun konteks membangun citra pendidikan nasional. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah mengeluarkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dana BOS beserta berbagai polemiknya selalu menjadi topik tersendiri dalam dunia pendidikan. Dilatar belakangi oleh rasa keingintahuan peneliti terhadap fungsi dan pemanfaatan dana BOS dalam peningkatan kualitas pendidikan, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai manajemen penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pencapaian mutu pembelajaran (Noor dan Monita, 2021; Alfiani, 2021)

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif. Metode ini digunakan karena peneliti menginginkan mendapatkan hasil penelitian yang mendalam, terus menerus, komprehensif, kontekstual serta holistik. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mengkaji lebih jauh dan menganalisis apa yang menjadi objek penelitian, tidak hanya sebatas menguji hipotesis. Peneliti juga bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kualitatif – tidak mengandalkan bukti-bukti berdasarkan logika matematis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam upaya pengumpulan data yang dibutuhkan yaitu wawancara mendalam, analisis dokumen dan observasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan yang bermutu menurut Aisah (2021) lahir dari sistem perencanaan yang baik (*good planning system*) dengan materi dan sistem tata kelola yang baik (*good governance system*) dan disampaikan oleh guru yang baik (*good teachers*) dengan komponen pendidikan yang bermutu, khususnya guru. Terkait dengan *good governance system*, salah satu program pemerintah yang mendorong kemajuan pendidikan adalah program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS merupakan sebuah kebijakan sektor pendidikan dari pemerintah untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pada Pasal 34 Ayat (2). Dan kemudian diatur ketentuan tentang wajib belajar ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Hakim, 2016).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga diatur mengenai Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Dukungan pemerintah merupakan aspek kunci keberhasilan pembangunan (Ramdhani dan Santosa, 2012), termasuk di dalamnya pada bidang pendidikan melalui dukungan dana BOS bagi sekolah.

BOS merupakan salah satu model pembiayaan pendidikan yang sangat populer di masyarakat, merakyat dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam upaya menuntaskan Wajib Belajar 9 tahun, pemerataan dan keadilan dalam bidang pendidikan serta upaya peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar. Program ini dikomandani oleh Departemen Pendidikan Nasional yang penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawabannya dilaksanakan secara terpadu oleh pihak yang terkait dari menteri hingga kepada Kepala Sekolah sekolah yang berhak menerima BOS sebagai pelaksana di lapangan. Dengan adanya BOS, diharapkan siswa dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tuntas Wajib Belajar 9 tahun. Namun, ternyata pada implementasinya, guliran dana BOS belum mampu membantu meningkatkan mutu pendidikan secara optimal. Hal ini terbukti dengan masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Indonesia yaitu sebesar 7.5 tahun (Data UNDP Tahun 2014). Angka ini menunjukkan, penduduk Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas sebagian besar hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar (6 tahun) atau kurang.

Selain itu, di tahun 2015, Anis Baswedan membuat laporan pendidikan Indonesia. Dalam laporan tersebut Anies menunjukkan data buruknya wajah pendidikan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir diantaranya adalah sebanyak 75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan; nilai rata-rata kompetensi guru di Indonesia hanya 44,5. Padahal, nilai standar kompetensi guru adalah 75; Indonesia berada dalam peringkat 40 dari 40 negara, pada pemetaan kualitas pendidikan. Menurut lembaga *The Learning Curve*; Indonesia menjadi peringkat 103 dunia, negara yang dunia pendidikannya diwarnai aksi suapmenyuap dan pungutan liar. Selain itu, Anies mengatakan, dalam bulan Oktober hingga November 2015, angka kekerasan yang melibatkan siswa di dalam dan luar sekolah di Indonesia mencapai 230 kasus. Kejahatan terorganisir juga menjadi masalah dalam pendidikan di Indonesia. Bahkan mengenai kejahatan terorganisir di bidang pendidikan ini Indonesia berada di peringkat 109 dunia (Moerni, 2021; Mulya dan Rahaju. 2021).

Dari berbagai permasalahan di atas, penulis menggarisbawahi terkait 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi SPM juga rendahnya kualitas pendidikan Indonesia dan tingginya pungutan liar di dunia Pendidikan Indonesia. Yang mana dengan semua permasalahan tersebut terkait dengan salah satu kebijakan pemerintah yaitu melalui implementasi dana BOS. Munculnya kebijakan Dana BOS bukan berarti behentinya permasalahan pendidikan, masalah baru muncul terkait dengan penyelewengan dana BOS, dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS, tujuan dari pemerintah sendiri baik, namun terkadang sistem yang ada menjadi bumerang dan menghadirkan masalah baru, selain itu pribadi dan budaya manusia

Indonesia ikut berpengaruh terhadap penyelewengan dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS.

Berdasarkan observasi awal peneliti banyak menemukan masalah dalam implementasi dana BOS. Dana BOS rawan untuk diselewangkan, pengalokasian dana BOS yang tidak tepat sasaran, pengalokasian dana BOS dipukul rata untuk semua sekolah di seluruh daerah tanpa terkecuali, swasta dan negeri sama. Padahal, tiap sekolah memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda. Masalah lainnya adalah keterlambatan penyaluran dana BOS. Masalah selanjutnya adalah masalah yang menjadi fokus utama penelitian ini yaitu terkait dengan pemenuhan mutu pembelajaran Indonesia. Permasalahan yang dihadapi bangsa ini adalah bahwa mutu pembelajaran di sekolah sampai saat ini belum relatif sama baik proses belajar- mengajarnya, kemampuan gurunya, sarana prasarananya, dan lain sebagainya. Rasanya tidak adil ketika setiap siswa/sekolah harus menempuh soal yang sama dalam UN, sedangkan sarana prasarana di setiap sekolah tidak sama, kemampuan gurunya juga tidak sama. UN sebagai salah satu barometer minimal bagi pembelajaran di sekolah. Apabila tidak ada barometer ini, sulit mengontrol mutu pembelajaran di sekolah. Selain itu, adanya perbedaan pemahaman istilah otonomi di sekolah, membuat mutu pembelajaran di sekolah semakin “tidak jelas”, bahkan tidak jarang ditemukan di rapor nilainya bagus, tetapi siswa yang bersangkutan masih belum bisa membaca, menulis, dan menghitung.

Pendidikan yang bermutu minimalnya harus memenuhi 8 SNP, dan banyak sekolah yang merasa dana BOS saja tidak cukup untuk memenuhi seluruh komponen tersebut. Penggunaan bantuan BOS hanya boleh digunakan pada 13 poin program penggunaan dana BOS. Sedangkan kebutuhan sekolah tidak hanya itu, terutama jika ingin memenuhi 8 standar SNP tersebut. Dampaknya adalah sekolah akan sulit mencapai standar-standar yang telah ditetapkan dalam SNP akibat keterbatasan dana yang ada, sedangkan pungutan- pungutan dari siswa tidak diperbolehkan. Dan tentunya hal itu dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan nasional yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia Indonesia

A) Program Pemanfaatan Dana Bos dalam Upaya Pencapaian Mutu Pembelajaran pada Tingkat Smp di Muaro Jambi

Sekolah belum dapat sepenuhnya membiayai program atau aktivitas yang dapat menciptakan KBM yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, sehingga tujuan pendidikan belum tentu dapat tercapai sesuai dengan harapan. Untuk dapat tercapainya sekolah yang bermutu, sekolah menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan, diawali dengan setiap sekolah perlu menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memuat upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. RKAS disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder termasuk kepala sekolah/madrasah, guru, komite sekolah/madrasah, dan orang tua siswa. RKAS akan menjadi acuan untuk melaksanakan perbaikan dalam proses pembelajaran, manajemen sekolah/madrasah, sarana-prasarana dan aspek sekolah yang penting lainnya.

Penggunaan dana BOS tidak boleh keluar dari juknis yang telah ditetapkan. Kepala sekolah harus pandai membagi keuangan kepada komponen-komponen pemenuhan SNP yang telah ditetapkan. Delapan SNP memiliki keterkaitan satu sama lain dan sebagian standar menjadi prasyarat bagi pemenuhan standar yang lainnya. Dalam kerangka sistem, bagian yang termasuk pada komponen proses pembelajaran adalah Standar Isi, Standar Proses, dan

Standar Evaluasi, sedangkan bagian yang termasuk pada komponen output adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Tim sekolah sudah menyusun Rencana Kerja Sekolah jangka Menengah dan jangka pendek sebagai acuan untuk pengembangan mutu pembelajaran. Adapun untuk program peningkatan mutu dibagi ke dalam beberapa program, yaitu program pengembangan sumber daya manusia, program pengajaran (kurikulum), program pengembangan model pembelajaran, program sistem evaluasi, program administrasi, program kegiatan bidang non akademik, program bidang sarana prasarana, program perpustakaan, program kegiatan unit kesehatan sekolah, program kegiatan pembinaan rohani, program hubungan kemasyarakatan. Setelah program tersusun, disesuaikan dengan dana yang tersedia kemudian dituangkan dalam RKAS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah). Sejauh ini program yang dibuat sudah terlaksana hampir 75%, belum bisa mencapai 100% karena dananya sendiri tidak mencukupi untuk mengimplementasikan seluruh program yang direncanakan.

Pada kenyataannya di lapangan sebagian besar sekolah belum bisa memenuhi mutu sebagai sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan, jangankan SNP, untuk pemenuhan SPM (Sekolah Pelayanan Minimal) saja cukup sulit dengan indikator yang cukup banyak. Indikator SPM Pendidikan Dasar yang termuat dalam Permendikbud 23/2013 mencakup 27 indikator, terdiri atas 14 indikator tanggung jawab kabupaten/kota, 13 indikator tanggung jawab sekolah/madrasah ini terkait dengan proses belajar mengajar yang bermutu, mencakup persyaratan minimal terkait dengan prasarana dan sarana, guru, kepala sekolah/madrasah, pengawas sekolah/madrasah, buku, media pembelajaran, kurikulum, rencana pembelajaran, proses pembelajaran; manajemen sekolah/madrasah, serta penjaminan mutu dan evaluasi pendidikan.

B) Permasalahan dalam Implementasi Dana Bos dalam Upaya Peningkatan Mutu Pembelajaran pada Tingkat Smp di Muaro Jambi

Terkait dengan implementasi program pencapaian mutu pembelajaran, masalah yang dihadapi adalah diantaranya factor guru yang kurang kompeten di bidangnya. Selain itu, perencanaan yang kurang matang, guru-guru terkesan mengajar apa adanya, RPP tidak dijadikan pijakan untuk bahan ajar. Selanjutnya kelengkapan sarana prasarana juga penting dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan yang menghasilkan pendidikan yang bermutu yang mana pada implementasinya kepala sekolah sulit untuk melengkapi sarana prasarana tersebut. Kepala sekolah tidak leluasa menggunakan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana yang lengkap karena jika yang dibutuhkan ternyata tidak ada dalam juknis penggunaan dana BOS. Komitmen pekerja (tenaga pendidik dan kependidikan) merupakan hal yang harus diperbaiki sedemikian rupa, sehingga penggunaan dana BOS dapat berjalan secara efektif dan efisien. Budaya organisasi dan komitmen pekerja merupakan faktor penting dalam mewujudkan keunggulan kualitas organisasi (Ramdhani et. al., 2017).

Selain itu, masalah yang krusialnya adalah banyak pihak mengeluhkan bahwa sebagian besar siswa sekolah yang sekarang ini kurang terampil dan tidak mampu berpikir kritis. Sebagian besar siswa tidak mampu berpikir sesuai dengan masalah yang disodorkan kepadanya, dan tidak mampu mencari pemecahan masalahnya dengan cara sendiri. Sementara itu karena terkait sistem pendidikan Indonesia juga, akhirnya sekolah lebih banyak untuk melatih anak dengan metode drill, anak dipacu untuk mengerjakan test tertulis berupa tes pilihan berganda, sedangkan tes lain seperti tes lisan (*oral test*), tes prilaku atau tampilan

(*performance test*) kurang diperhatikan dalam penilaian siswa, sehingga proses pembelajaran hanya terfokus pada aspek kognitif saja, sedangkan pada aspek afektif dan psikomotor masih terabaikan.

Dalam implementasi penggunaan dana BOS, terdapat ketidaksesuaian antara RKAS dan implementasi. Hal ini disebabkan karena terkadang pada waktu pelaksanaannya, banyak anggaran yang tiba-tiba diperlukan dan mendesak, namun tidak termuat dalam RKAS. Bahkan seringkali ada pungutan atau ada yang harus dibayarkan ke dinas pendidikan tingkat kecamatan atau kabupaten yang tidak bisa di SPJ-kan. Masalah lainnya adalah faktor SDM sebagai pengelola BOS, masih banyak ditemukan Kepala Sekolah yang kurang paham atau kurang mengerti akan juknis BOS, menggunakan dana tidak sesuai juknis BOS dan RKAS sekolah, bahkan RKAS nya pun *copy paste* dari sekolah lain.

Hambatan lainnya *monitoring* dan evaluasi dilakukan tidak secara berkala dan minimnya jumlah petugas yang melakukan monitoring dan evaluasi tersebut. Belum adanya transparansi penggunaan dana BOS merupakan temuan dalam penelitian ini. Sebagaimana yang seharusnya dilakukan, laporan penggunaan dana BOS seharusnya diketahui oleh seluruh *stakeholder*, terutama orang tua peserta didik, komite dan sebagainya. Namun, kenyataannya di lapangan, orang tua cenderung tidak tahu untuk apa saja dana BOS digunakan bahkan kepala sekolah enggan memperlihatkan SPJ BOS kepada pihak lain yang dianggapnya tidak berkepentingan.

C) Langkah Perbaikan ke Depan Dalam Upaya Mencapai Optimalisasi Pemanfaatan Dana Bos untuk Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran Tingkat Smp di Muaro Jambi

Terkait dengan implementasi pencapaian mutu pembelajaran, langkah yang telah diambil sekolah sebagai upaya perbaikan adalah sebagai berikut. Untuk kompetensi SDM, pihak UPTD, pengawas juga sekolah melakukan supervisi secara berkala yaitu minimalnya tiap awal semester melakukan kunjungan ke sekolah untuk memberikan pengarahannya, pembinaan dan penilaian pembelajaran, Selain itu guru juga di ikut sertakan dalam seminar dan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi. Terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana, sekolah secara berkala dan bertahap memenuhi kebutuhan sekolah yang tentunya sesuai juknis dapat bersumber dari dana BOS, seperti pembelian buku penunjang pembelajaran, alat peraga dan lain sebagainya. Intinya dalam hal ini kepala sekolah harus cerdas dan cermat memajemen dana BOS agar tepat sasaran.

Terkait dengan peningkatan hasil US sebagai salah satu indikator keberhasilan pembelajaran, sekolah terus berupaya untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi berpengaruh pada perolehan nilai US, diantaranya dengan pemantapan mata pelajaran US, siswa berlatih mengikuti *try out*, guru-guru diikutsertakan dalam berbagai pelatihan pembelajaran Sementara itu dalam aspek penilaian di sekolah yang cenderung lebih pada mengukur keberhasilan pada aspek kognitif saja, sekolah telah membuat berbagai program supaya siswa ikut aktif dalam pembelajaran, sehingga terasah aspek lainnya yaitu aspek psikomotorik dan afektifnya. Penilaian tidak hanya melalui tes tertulis, tapi juga melalui tes lisan serta pembuatan proyek. Selain itu, melalui kegiatan ekstrakurikuler juga diharapkan dapat membantu peserta didik meningkatkan keterampilannya sesuai minat dan bakatnya masing-masing.

Implementasi penggunaan dana BOS diupayakan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat dalam RAKS supaya apa yang menjadi kebutuhan sekolah yang telah dirancang

sebelumnya dapat terpenuhi dengan baik. Terkait dengan pencairan dana BOS pencairan yang seringkali terlambat diantisipasi dengan melakukan pinjaman pada pihak ketiga atau menggunakan dana pribadi, sehingga tidak menghambat proses pembelajaran di sekolah.

Untuk kemajuan sekolah, kepala sekolah dituntut menyusun visi dan misi sebaik mungkin supaya dijadikan acuan tujuan sekolah yang ingin dicapai. Kemudian Kepala sekolah menjabarkan visi dan misi tersebut kedalam program yang berkesinambungan dan mensosialisasikannya kepada semua *stakeholder*, sehingga seluruh pihak terkait dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

4. KESIMPULAN

Adapun simpulan secara khusus merujuk pada tujuan penelitian adalah implementasi pengelolaan dana BOS pada tingkat SMP di Kabupaten Muaro Jambi sudah berpijak pada perundang-undangan serta peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku, namun hasilnya belum optimal karena adanya keterbatasan dana yang diterima oleh pihak sekolah, dengan dana BOS pihak sekolah hanya mampu mencukupi kebutuhan operasional sehari-hari saja, yaitu terkait dengan proses pembelajaran, itu pun baru sebatas implementasi rutinitas saja, masih belum bisa memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Sebagian pihak sekolah belum memprioritaskan penggunaan anggaran pada hal-hal yang sifatnya penting terkait dengan proses belajar mengajar peserta didik, masih kepada pemenuhan operasional sehari-hari saja. Selain itu, kepala sekolah sulit melakukan inovasi karena penggunaan dana BOS tidak boleh digunakan selain dari 13 komponen yang telah ditetapkan dalam Buku Petunjuk Teknis (Juknis) penggunaan dana BOS.

Permasalahan dalam implementasi dana BOS dalam upaya pencapaian mutu pembelajaran tingkat SMP cukup banyak dirasakan oleh pihak sekolah. Sistem pendidikan dan penilaian cenderung pada hasil kognitif saja dan mengabaikan ranah yang lain. Dana BOS saja tidak mencukupi untuk pencapaian pembelajaran yang bermutu. Keterlambatan pencairan dana BOS menjadi hambatan yang cukup besar serta kurangnya kesadaran dan pemahaman kepala sekolah dalam mengelola dana BOS yang transparansi dan akuntabel. Terjadi kesenjangan kebutuhan dana di Kota dan di pelosok daerah, hal tersebut membuat pemerataan pendidikan sulit ditingkatkan.

Langkah perbaikan ke depan, kepala sekolah berupaya membuat skala prioritas, yang paling besar peruntukannya adalah untuk pemenuhan biaya pengembangan standar pendidikan dan kependidikan serta proses kegiatan belajar mengajar serta standar kelulusan. Pemerintah mengkaji kenaikan dana BOS secara berkala. Kompetensi para pelaksana di sekolah perlu ditingkatkan dengan pelatihan dan sosialisasi. Peruntukan dana BOS diperluas sehingga bisa memenuhi kebutuhan sekolah lainnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, D. S., Ulfah, U., Damayanti, W. K., & Barlian, U. C. (2021). Manajemen PAUD berdaya saing untuk meningkatkan mutu pendidikan. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 385-397.
- Alfiani, M. (2021). Komparasi pengelolaan dana bos sebelum dan pada saat pandemi covid 19. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 1927-1941.

- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1), 53-64.
- Moerni, I. S. (2021). Analisis efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. *Praja observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(1), 51-58.
- Mulya, M. H. W., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di Surabaya. *Publika*, 9(3), 181-194.
- Noor, T. R., & Monita, E. (2021). Efisiensi alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada masa pandemi Covid-19. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 6(1), 51-58.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Ainisyifa, H. (2017). Conceptual framework of corporate culture influenced on employees commitment to organization. *International Business Management*, 11(3), 826-803
- Ramdhani, M. A., & Santosa, E. (2012). Key succes factors for organic farming development. *International Journal of Basic and Applied Science*, 1(1), 7-13.
- Saisarani, K. G. P., & Sinarwati, N. K. (2021). Analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 4 Singaraja tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(2), 340-348.
- Sari, P., Masyitah, E., & Sari, E. P. (2021). Analisis pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) pada SDN 060864. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 3(1), 84-90.